

GE LIAT DA LAM KE TER **BATAS** AN

Catatan Awal Tahun
KESENIAN
2016



**GELIAT DALAM KETERBATASAN:
Catatan Awal Tahun Kesenian 2016**

Penulis: Annayu Maharani, Hafez Gumay, Nur Azizah, Oming Putri
Penyunting: Annayu Maharani

Desainer: hade

Koalisi Seni Indonesia

Jl. Amil Raya No. 7A
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

www.koalisiseni.or.id

Copyright © 2016 Koalisi Seni Indonesia



Daftar Isi

- 4 Daftar Isi
- 5 Catatan Editor
- 7 Ringkasan Eksekutif

I.

9 NEGARA DAN KESENIAN

- 11 **Nota Keuangan Sektor Kebudayaan 2015** Annayu Maharani
- 14 **Lembaga Seni Pemerintah Daerah** Annayu Maharani
- 16 **Mengembalikan Potensi Taman Budaya** Annayu Maharani

II.

19 PERHELATAN SENI 2015: MEWUJUDKAN GAGASAN, MENANGGAPI ISU NASIONAL

- 21 **Panggung-Panggung dan Kita: Catatan dari Metro, Mataram, dan Makassar** Nur Azizah
- 27 **Jika Korupsi, Maka #SENILAWANKORUPSI Beraksi** Nur Azizah
- 30 **Bangun Bali, Bukan Reklamasi** Nur Azizah
- 33 **Melawan ASAP, As Soon As Possible** Nur Azizah

III.

37 **YANG HENDAK BERSIKAP: RUU KEBUDAYAAN, BEKRAF, KONGRES KESENIAN III, dan DIRJEN KEBUDAYAAN**

- 39 **RUU Kebudayaan: Polemik yang Tak Kunjung Usai** M. Hafez Gumay
- 42 **BEKRAF: Keterbatasan di Tahun Pertama** Annayu Maharani
- 45 **Letupan Imajinasi Frankfurt** Oming Putri
- 48 **Kongres Kesenian III: Meneguhkan Posisi Kesenian dan Negara** Oming Putri
- 51 **Terjawab: Dirjen Kebudayaan Baru** Annayu Maharani

Catatan Editor

Pada mulanya tidak lebih dari semacam publikasi yang merangkum setahun penuh dinamika kesenian Indonesia. Namun, rangkuman ini meluas jadi catatan yang mencakup relasi seni, masyarakat, dan Negara dalam perspektif sosial-politik.

Geliat Dalam Keterbatasan: Catatan Awal Tahun Kesenian 2016 tidak lepas dari isu yang diangkat Koalisi Seni, yaitu mewujudkan ekosistem kesenian Indonesia yang lebih baik dengan mendorong keterlibatan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan. Atas dasar sikap itulah, topik-topik yang diangkat dan pembacaan yang dilakukan oleh para penulis di publikasi ini mengerucut pada apa saja yang dilakukan dua agensi berikut, yakni Negara dan masyarakat. Pen-jaringan data pun dilakukan dengan metode wawancara, kliping surat kabar, dan *database* internal.

Publikasi ini terbagi menjadi tiga bagian. Topik tentang instrumen Negara di Pusat dan Daerah merupakan bagian pertama. Anggaran sektor kebudayaan di Kemendikbud yang ditulis oleh **Annayu Maharani** memproyeksikan apa saja agenda pemerintah Pusat dan penerapannya selama setahun penuh. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan perihal manajemen kelembagaan dan infrastruktur di daerah yang menyinggung tentang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta kondisi terakhir Taman Budaya. Kembali, masalah kurangnya sumber daya manusia yang cakap di dua kelembagaan tersebut menjadi faktor utama kinerja dan output program yang ala kadarnya.

Pengelolaan dan pengembangan kesenian oleh Negara seperti yang direpre-sentasikan di atas masih tidak cukup cepat untuk mengimbangi laju kesenian yang digerakan oleh masyarakat. Perhelatan Seni menjadi tajuk di bagian kedua. Apa yang terjadi di luar Jawa misalnya; seperti di provinsi Bandar Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan selalu mengalami peningkatan. **Nur Azizah** melihat acara seni di tiga lokasi tersebut tumbuh berkembang menjadi perayaan dan menimbulkan rasa kepemilikan bersama. Tidak hanya berakhir menjadi selebrasi semata, Nur Azizah juga mencatat begitu banyak acara seni di tahun ini yang bertransformasi menjadi suatu sikap politis dan perhelatan untuk menghimpun sumbangan sosial.

Di tengah keruhnya situasi yang terjadi selama 2015 seperti pelarangan kebebasan berekspresi dan carut-marut anggota DPR, laku Negara kepada sektor kesenian tampak dari perihal yang menyangkut peristiwa politik dan acara seni berskala besar. Ada empat dari lima peristiwa yang hanya terjadi di tahun sebelumnya, namun mempunyai dampak besar terhadap gerak dan ruang lingkup kesenian di tahun-tahun selanjutnya.

Frankfurt Book Fair 2015 dan Kongres Kesenian III yang masing-masing ditulis oleh **Oming Putri** merefleksikan bagaimana upaya dari sebuah kegiatan diplomasi kebudayaan dan rekomendasi pengembangan kesenian untuk pemerintah. Begitu juga dengan tulisan **Annayu Maharani** tentang keputusan Presiden atas pendirian Bekraf dan harapan untuk Dirjen Kebudayaan baru. Terakhir, RUU Kebudayaan dengan kelemahan substansinya masih menunggu antrean di daftar Prolegnas sampai 2019. **Hafez Gumay** akan menjelaskan kronologinya secara lebih rinci beserta alasan mengapa RUU ini perlu diadvokasi.

Tanpa perlu berpanjang-panjang, selamat membaca.

Jakarta, Januari 2016

Ringkasan Eksekutif

1

Aspirasi politik di masyarakat semakin kuat dan diwujudkan menjadi tema sebuah acara maupun pesan karya seni. Isu-isu nasional yang menghiasi muka depan surat kabar seperti pelemahan lembaga KPK, eksploitasi Teluk Benoa di Bali, dan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan ditanggapi masyarakat secara terampil dan kreatif.

Terlepas dari aspirasi politik yang diusung, pada dasarnya perhelatan pameran, pertunjukan, dan festival tumbuh dan berkembang secara organik di masyarakat. Perkembangan kesenian di luar Jawa seperti di kota Metro, Mataram, dan Makassar misalnya, terus menggeliat dan dilakukan secara mandiri. Kemandirian ini sangat baik dalam pembentukan agensi di mana masing-masing daerah lantas menawarkan bentuk-bentuk artistik yang beragam dan menancapkan identitas kotanya.

2

Meskipun begitu, perkembangan kesenian lokal belum diikuti dengan pembenahan kelembagaan Pemerintah Daerah. Sebagian besar Dinas Kebudayaan di beberapa daerah masih menyisakan persoalan seperti manajemen anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini tercermin pada pemeliharaan Taman Budaya dan output kegiatan Dinas Kebudayaan.

Taman Budaya dapat dikatakan sebagai infrastruktur seni yang tersedia merata di berbagai daerah di Indonesia. Atas permasalahan kompetensi sumber daya manusia seperti tidak adanya program reguler yang diadakan, Taman Budaya belum dapat dikatakan sebagai ruang publik kesenian yang 'benar-benar hidup'. Sementara, kegiatan yang dilakukan Dinas Kesenian belum optimal melibatkan komunitas seni setempat. Seniman lokal kerap kali merasa bahwa mereka tidak diajak dalam perencanaan program sehingga program yang dibuat Dinas Kebudayaan kerap kali hanya fokus pada kegiatan pariwisata dan seremonial, sementara Dinas kerap kesulitan menemukan seniman baru untuk diajak bekerjasama. Hal inilah yang kemudian membuat progresivitas kesenian daerah tidak merata.

3

Keterlibatan pihak-pihak profesional dalam struktur pemerintah Pusat dan acara berskala besar selama 2015 meningkatkan *outcome* kegiatan sekaligus membuka peluang kemitraan yang lebih akuntabel antara Negara-masyarakat di kemudian hari.

Kegiatan berskala nasional dan internasional seperti Frankfurt Book Fair dan Kongres Kesenian III melibatkan ratusan pelaku seni budaya hari ini dan berperan sebagai panitia, penampil, maupun peserta. Frankfurt Book Fair melancarkan misi diplomasinya tentang kesusastraan Indonesia yang ikut andil dalam kebudayaan global atas kekayaan ‘cerita’ yang dimilikinya. Kongres Kesenian III sendiri berhasil melahirkan rekomendasi pengembangan seni budaya yang ditujukan untuk pemerintah.

Dua tokoh yang berasal dari kalangan profesional, yakni Triawan Munaf dan Hilmar Farid, terpilih mengepalai jabatan lembaga sektor kebudayaan di Pusat. Triawan Munaf yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi mengepalai Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sebuah badan independen pemerintah yang secara tidak langsung dapat merangsang pembenahan infrastruktur dan suntikan modal untuk produktivitas kesenian. Kemudian, Hilmar Farid yang dilantik di penghujung 2015 sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud cukup menuai dukungan yang positif dari khalayak atas reputasinya sebagai sejarawan juga akademisi. Kinerja kedua tokoh tersebut dalam tahun ini perlu dicermati atas dukungan publik yang telah mereka raih.

I NEGARA DAN KESENIAN



Nota Keuangan Sektor Kebudayaan 2015

Annayu Maharani

Proporsi anggaran 2015 Dirjen Kebudayaan Kemendikbud masih berada di kisaran yang sama, atau dengan kata lain tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal itu bisa berarti dua hal. Pertama, anggaran sektor kebudayaan “aman tersegel” pada taksiran satu trilyun rupiah saja selama beberapa tahun terakhir, seolah steril dari situasi ekonomi nasional yang pasang surut akibat kelesuan ekonomi global. Atau kedua, tidak dilihatnya sektor kebudayaan ke dalam strategi pembangunan.

Depresiasi nilai tukar rupiah (Rp 13.351 pada November 2015) dan inflasi 3% merupakan situasi ekonomi Indonesia yang melambat pada tahun ini, di mana pemerintah berusaha menopangnya melalui pembangunan infrastruktur demi percepatan pertumbuhan ekonomi domestik. Perbaikan bidang logistik dan transportasi di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi beserta daerah-daerah perbatasan adalah bentuk penerapannya.

Sementara, apa yang diusahakan Negara dalam Nawa Cita tentang pembangunan sumber daya manusia seperti tidak terintegrasi dengan pengembangan sektor kebudayaan, dalam hal ini tercermin dari postur anggaran Dirjen Kebudayaan. Dengan melihat pagu APBN 2015 Kemendikbud terbaru—yang mengalami penyesuaian setelah Ditjen Pendidikan Tinggi berpindah ke Kemenristek, alokasi anggaran ke Dirjen Kebudayaan adalah Rp 1,401 Trilyun dari total Rp 46,8 Trilyun APBN Kemendikbud.

Untuk Direktorat Kesenian dan Perfilman sendiri, alokasinya adalah Rp 150,73 M. Pada dua tahun sebelumnya, masing-masing anggaran Dirjen Kebudayaan dan Direktorat Kesenian dan Perfilman adalah Rp 1,25 T dan Rp 225 M (2013), selanjutnya Rp 1,14 T dan Rp 141 M (2014). Jika dibuat perbandingan dasar, maka pada 2015, persentase sektor Kebudayaan di kementerian yang dipimpin Anies Baswedan tersebut adalah 2,99% saja, menyisakan 97,01% untuk pendidikan. Jelas, terlihat tidak hanya proporsi anggaran yang berarti, namun juga perhatian yang tidak seimbang atas sektor yang berdampingan dengan pendidikan itu di Kemendikbud.

Keputusan pengalokasian anggaran tidak lepas dari kalkulasi agenda setahun yang diajukan oleh pemerintah. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun yang sama, pengembangan sektor kebudayaan dirangkum dalam sejumlah agenda yang terdiri dari Peningkatan Apresiasi Karya Budaya, Pengelolaan Warisan Budaya, Diplomasi, dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan.

Salah satu penerapan RKP yang dijalankan Dirjen Kebudayaan adalah program Data Pokok Kebudayaan sebagai upaya pendataan dan pendokumentasian seni budaya Indonesia. Dalam laporan kegiatan setahun Kemendikbud, program tersebut menjadi *highlight* khusus sektor kebudayaan. Tertulis adanya progresi yang melampaui target atas registrasi berbasis daring di mana masyarakat dapat ikut serta membuat daftar. Dari target 3000 buah, entri data yang masuk mencapai 10.532.

Selain itu, realisasi RKP adalah pemberian fasilitas kesenian di sekolah yang dikerjakan oleh Direktorat Kesenian dan Perfilman. Pendirian laboratorium seni budaya dan film akan dibangun di 21 sekolah, contohnya adalah SMKN 10 Bandung dan SMA 1 Muhammadiyah Pekalongan. Pemberian fasilitas kesenian di sekolah juga dikerjakan di tahun sebelumnya oleh Direktorat ini, seperti pemberian alat musik degung dan angklung ke sekolah-sekolah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Pada September, laman Kemendikbud memberitakan penyerapan anggaran kementeriannya. Penyerapan anggaran di paruh pertama itu sudah terserap sekitar 44%. Angka ini menggambarkan situasi yang relatif stabil memang, mengingat terjadi restrukturisasi di kementerian ini. Anies Baswedan dalam pemberitaan tersebut melanjutkan bahwa prediksinya adalah dapat menyerap anggaran di atas 93% sampai akhir tahun, membuka peluang kenaikan penyerapan dari tahun

sebelumnya yang mencapai 91%. Meskipun begitu, terjadi serapan terendah yang berada di Dirjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Apa boleh buat: proses lelang jabatan untuk mengisi posisi Direktur dua Eselon I yang berjalan berlarut-larut selama 2015 tersebut menjadi salah satu penyebabnya.

**Persentase sektor
Kebudayaan di
Kemendikbud
adalah 2,99%
saja....**

APBN-P (APBN-Perubahan) yang mulai cair di kuartal ketiga menjadi suntikan dana dan kesempatan untuk memaksimalan program. Pagu terakhir Dirjen Kebudayaan menjadi Rp 1, 72 T. APBN-P kemudian dibelanjakan untuk Taman Budaya. Program yang dimulai dengan syarat pengajuan Dinas Kebudayaan setempat tersebut dialokasikan untuk Taman Budaya di Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dananya bisa bervariasi, antara Rp 4-6 M.



Ilustrasi: dari *Radar Banyumas*

Lantas, apakah program-program seperti Data Pokok Kebudayaan, Pemberian Fasilitas Seni di Sekolah, dan Revitalisasi Taman Budaya merupakan penerapan yang tepat dengan apa yang ingin dicapai dalam empat agenda besar tersebut?

Nanti dulu. Bagaimanapun, Dirjen Kebudayaan merupakan representasi pengembangan sektor kebudayaan dari Pusat, meski ruang gerak pengembangan dilaksanakan secara paralel, yaitu di pusat dan di daerah (direpresentasikan oleh Dinas Kebudayaan). Stagnansi anggaran di Dirjen Kebudayaan dan kecilnya proporsi dibandingkan dengan sektor pendidikan jelas menghambat ruang gerak kinerja Eselon I ini. Cakupan bidang Dirjen yang mempunyai lima direktorat ini cukup luas dan tidak bisa disepelekan: kesenian, cagar budaya, sejarah, tradisi, nilai-nilai budaya, dan diplomasi kebudayaan.

Kita sedang menyoal posisi kebudayaan di dalam strategi pembangunan dengan perannya sebagai pembentukan identitas, nasionalisme, dan kualitas sumber daya manusia. Investasi serius dalam bentuk besarnya anggaran sektor kebudayaan merupakan salah satu alat ukur terpenting yang tidak bisa diabaikan.

Lembaga Seni Pemerintah Daerah

Annayu Maharani

Sebagian besar Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian kurang berkontribusi dalam menghidupkan kesenian di daerahnya. Pada Dinas Kebudayaan, hal ini terlihat melalui minimnya pemeliharaan aset Taman Budaya dan rendahnya inisiatif *output* acara seni yang hanya melulu ditujukan untuk agenda pariwisata dan sesi seremonial.

Dewan Kesenian sendiri dipandang belum benar-benar berfungsi sebagai representasi komunitas seni di daerahnya dan mendorong geliat seni berdasarkan konteks lokal. Seluruh fungsi pendirian dua lembaga tersebut justru diambil alih oleh komunitas dan lembaga seni independen yang berkembang pesat di daerahnya. Tidak heran jika hubungan lembaga pemerintah di daerah dengan pegiat seni lokal menjadi berjarak.

Minimnya kontribusi Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian banyak ditemukan di daerah-daerah di luar Jawa. Di Mataram, sistem kepengurusan Dewan Kesenian tersendat. Seharusnya periode pengurus Dewan yang baru sudah berjalan, namun sampai saat ini dibuat proses pergantian tersebut belum terlaksana. Dewan Kesenian Mataram tidak memiliki kantor untuk beraktivitas karena gedungnya dibongkar untuk renovasi Taman Budaya. Alokasi dana dari Pemda ke Dewan pun tidak jelas dan pencairannya tidak rutin setiap tahun.

Masalah yang cukup spesifik terjadi di Dewan Kesenian Pekan Baru. Mayoritas pengurus Dewan Kesenian Pekan Baru teranyar yang terdiri dari pegiat media massa menunjukkan ketidaksesuaian kualifikasi bidang. Seniman setempat berkegiatan di tempat lain, di komunitasnya masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan pegiat kesenian supaya bisa tampil representatif.

Dewan Kesenian di Palu justru baru saja terbentuk pada 2015 ini. Lembaga tersebut sampai sekarang juga belum bisa beraktivitas karena belum ada alokasi anggaran dana untuknya. Namun, ada kontribusi dalam pengembangan kesenian di ibukota Sulawesi Tengah ini dari Dinas Informasi dan Komunikasi. Dinas ini memiliki sejumlah dana yang bisa digunakan untuk sektor kesenian, terutama jika para pegiat seni bersedia membantu dinas tersebut menyosialisasikan program Kemenkominfo dengan menggunakan media seni. Setidaknya di Palu ada

semacam alternatif sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh pegiat seni setempat, mengisni minimnya peran Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian di sana.

Kinerja Dinas Kebudayaan maupun Dewan Kesenian sejauh ini menunjukkan beberapa kelemahan yang disebabkan oleh persoalan yang terkait sumber daya manusia.

Pertama, aspek anggaran. Mulai dari perencanaan, penggunaan dan evaluasi perlu lebih transparan dalam arti melibatkan masyarakat, diumumkan berapa jumlahnya, bagaimana cara mengaksesnya dan bagaimana pelaporannya.



Kedua, aspek program. Perlu melibatkan para pegiat kesenian dari berbagai kelompok, bukan saja hanya seniman senior atau yang dekat dengan staf pemerintahan. Program selama ini hanya fokus pada pentas dan festival, belum memulai bentuk yang lain seperti penelitian, dokumentasi, dan pendidikan.



Ketiga, perspektif tentang kesenian itu sendiri. Saat ini sebagian besar program pemerintah daerah masih terpaku pada kesneian sebagai bentuk kesenian tradisional atau masa lampau, padahal banyak komunitas seni baru dan kontemporer sedang bertumbuhan di sekitar mereka tanpa terdeteksi dan terfasilitasi. Dan terakhir, jika ada pelaksanaan event kesenian hendaknya diserahkan kepada seniman setempat, secara merata, dan bukan melibatkan event organizer. Aturan mengenai bidding sebuah event juga harus diubah agar lebih menunjang komunitas seni.



Posisi dua lembaga tersebut sebenarnya sulit, karena mereka memang merupakan afiliasi dari pemerintah daerah sehingga mengandalkan sumber dana tunggal yakni dari APBD. Sebagian besar Dewan Kesenian yang posisinya lebih independen cenderung belum memiliki kapasitas untuk mencari dana di

luar anggaran pemerintah.

Jika Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian di daerah tidak dibenahi segera sedangkan inisiatif-inisiatif dari komunitas seni selalu produktif, maka keduanya akan berjalan sendiri-sendiri dan cenderung menjauh. Hal ini menimbulkan tendensi tidak adanya sinergivitas dalam menciptakan identitas kultural cap lokal melalui aktivitas agensi dan kegiatan seni di daerah masing-masing. Bertemunya pemahaman di antara seniman dengan pemerintah setempat menjadi salah satu agenda mendesak demi kesenian di daerah yang lebih maju.

Mengembalikan Posisi Taman Budaya

Annayu Maharani

Taman Budaya dapat dikatakan sebagai infrastruktur kesenian yang tersedia merata di berbagai daerah di Indonesia. Pada beberapa daerah di Indonesia, Taman Budaya masih memegang peran sebagai ruang berkegiatan kesenian setempat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kesenian di beberapa kota yang memiliki satu ciri kesamaan, yakni di mana komunitas maupun lembaga seni di daerah tersebut belum memiliki modal ruang yang memadai.

Kota Palu, Mataram, Kupang, serta Pontianak merupakan contoh kota dengan komunitas seni yang masih mengandalkan Taman Budaya untuk penyelenggaraan kegiatan mereka. Komunitas seni di sana bertumbuh dan menghasilkan berbagai kegiatan seni dan pemain baru; namun tidak diikuti dengan suplai infrastruktur yang memadai. Di satu sisi, Taman Budaya menjadi satu-satunya pilihan penyelenggaraan kegiatan seni dengan segala kekurangannya; namun di sisi lain pilihan tersebut mengaktivasi ruang itu sendiri.

Di kota Palu, Pontianak, dan Mataram Taman Budaya masih menjadi sentral kegiatan bagi sejumlah seniman. Taman Budaya Palu kerap dipakai untuk melangsungkan pameran, diskusi, FGD dan juga pentas kesenian lainnya. Kompleks Taman Budaya Pontianak dan Mataram juga cukup lengkap dengan teater terbuka di dalamnya. Di Pontianak, kegiatan seni lebih berpusat di teater terbuka dibandingkan di gedung utama karena lebih mudah diakses. Sedangkan di Mataram, titik yang menjadi tempat berkumpul seniman setempat adalah sebuah warung pojok di halaman Taman Budaya tersebut.

Bisa dibilang, hanya Taman Budaya Kupang yang mempunyai program reguler dan dimanfaatkan cukup optimal. Taman Budaya di Kupang sampai sekarang membidani beberapa sanggar kesenian tradisional, khususnya seni tari. Sanggar-sanggar tersebut memanfaatkan Taman Budaya sebagai tempat latihan dan pertunjukan. Hal yang sama dilakukan oleh pihak lain seperti kampus, kelompok masyarakat, serta instansi yang mengadakan kegiatan di Taman Budaya Kupang.



Acara Temu Taman Budaya Kupang 2015 di Taman Budaya Kupang. Foto oleh: suaraindependen.com

Meskipun Taman Budaya di keempat kota tersebut bersinggungan dengan acara kesenian yang ada, namun sebenarnya banyak sekali kekurangan di segi kualitas gedung,

Taman Budaya Palu sangat perlu direnovasi karena banyak sekali fasilitas yang sudah tidak layak, misalnya soal penyejuk udara, tata suara, sirkulasi udara, pencahayaan, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan juga perbaikan kebersihan dan kamar mandi. Luas gedung juga perlu diperlebar untuk mengakomodasi kegiatan kesenian yang lebih banyak dalam waktu serentak. Masalah ini setidaknya mulai diatasi oleh seniman-seniman muda di Palu. Mereka menyediakan sendiri tempat berkesenian dalam bentuk *open house* (rumah yang digunakan sebagai ruang publik) ataupun di kafe dan restoran. Dari pernyataan mereka, alternatif ini muncul karena mereka tidak kenal pegawai Dinas setempat sehingga tidak tahu prosedur penggunaannya Taman Budaya.

Baru-baru ini, Taman Budaya Mataram sedang direnovasi dan kantor Dewan Kesenian NTB yang berada di Taman Budaya tersebut juga turut dibongkar. Imbasnya, tidak ada tempat sementara sebagai pengganti. Terlihat bahwa memang belum ada dialog yang baik antara pengambil kebijakan dengan pegiat kesenian.

Komunitas seni di Kupang juga menawarkan alternatif sendiri. Komunitas sastra di Kupang misalnya, jarang menggunakan Taman Budaya untuk kegiatan mere-

ka. Kegiatan seperti diskusi dan bedah buku oleh Komunitas Dusun Flobamora dan Rumah Poetica kerap berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Komunitas Filokalia berkegiatan di Universitas Widyamandira dan Uma Kreatif Inspiratif Mezra memanfaatkan rumah pribadi Mezra Pelandou, seorang tokoh kesenian setempat.

Keengganan para komunitas sastra mengadakan kegiatan di Taman Budaya adalah karena faktor birokrasi. Alasan penyelenggaraan acara besar seperti Temu Sastrawan oleh Pusat Bahasa NTT diadakan di Taman Budaya karena tempat tersebut dianggap paling “resmi”. Sementara, Komunitas Dusun Flobamora lebih memilih taman umum bernama Taman Nostalgia sebagai tempat berkegiatan mereka. Dengan mengadakan diskusi buku di Taman Nostalgia, ketertarikan publik terhadap sastra bisa lebih terjangkau karena taman ini sering dimanfaatkan warga setempat.

Kekurangan di aspek manajemen juga terjadi. Jam operasional Taman Budaya mengikuti waktu kerja birokrasi seringkali menghambat kegiatan komunitas. Biaya sewa operasional untuk sebuah pertunjukan di Taman Budaya juga tidak sedikit, dan hal ini cukup sulit diusahakan oleh komunitas seni. Jikapun ada bantuan, pihak swasta lebih sering mengambil alih di dalam bantuan finansial.

Ada opini yang mengatakan bahwa mengadakan kegiatan di Taman Budaya akan lebih gampang birokasinya jika mengenal orang dalam. Selain itu, biaya sewa Taman Budaya juga sulit diusahakan komunitas. Masalah akses turut berpengaruh. Rencana pemerintah kota Pontianak terhadap pemindahan Taman Budaya, dari lokasi yang strategis di pusat kota ke daerah yang lebih pinggir, menjadi masalah yang sedang dihadapi komunitas seni di sana.

Sistem yang tidak fleksibel dan kualitas gedung memang masih menjadi permasalahan utama. Jika dua hal tersebut diperbaiki, maka dapat kita bayangkan pemanfaatan yang lebih optimal oleh komunitas dan meningkatnya perkembangan seni lokal, atas infrastruktur yang memadai dan merata di daerah-daerah.

II **PERHELATAN SENI 2015:**

**Mewujudkan Gagasan,
Menanggapi Isu Nasional**



Panggung-Panggung dan Kita:

Catatan dari Metro, Mataram, dan Makassar

Nur Azizah

Berteater menjadi aktivitas sehari-hari yang dilakukan para pelajar sebagian besar kota di Lampung. Kota Metro yang berjarak dari 49,2 km barat laut dari ibukota Bandar Lampung, juga sangat akrab dengan seni pertunjukan ini. Latihan teater kerap terlihat di beberapa tempat, seperti Nuwo Budaya-Rumah Budaya Kota Metro dan di lapangan Dewan Kesenian Metro setiap Kamis sore.

Absennya Liga Teater Pelajar yang menjadi panggung bagi para pelajar pegiat teater seantero Lampung pada tahun lalu menyebabkan beberapa pihak mengambil alih untuk menjadi penyelenggara. Mereka adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) dan Dewan Kesenian kota Metro. Liga tersebut kembali digelar 11-12 Desember 2015 di kota Metro, dan berhasil menghadirkan delapan kelompok teater lintas kabupaten Lampung.

“Yang saya tahu ada beberapa peserta kabupaten (di Lampung) yang sering sekali latihan di sekolahnya, makanya kita tetap buat event itu. Liga Teater Pelajar sekarang bukan resmi milik Dinas Provinsi lagi, tapi setidaknya menjadi ruang bagi anak-anak yang terus melakukan latihan teater,” ujar Kepala Dikbudpora Metro, Ahmad Rifian Al Chepy.

Kata ‘konsisten’ memang menjadi tantangan demi menjaga keberlangsungan acara yang sudah menjadi tradisi itu. Apalagi, ketika acara tersebut dianggap berhasil mewadahi potensi kreativitas masyarakat setempat dan mulai identik pada kota di mana ia diselenggarakan.

Seperti halnya yang terjadi di Makassar dengan Makassar International Writers Festival 3-6 Juni 2015.

MIWF 2015 memasuki usianya yang kelima. Mengusung 60 seniman dan 20 partisipan dari negara lain kiranya layak bila kegiatan yang digawangi Rumata’ Art Space menjadi festival sastra terbesar di Indonesia bagian timur. Daftar penulis Indonesia yang hadir antara lain Seno Gumira Ajidarma, Maman Suherman, Leila S. Chudori dan Erni Aladjai; sedangkan dari luar negeri adalah Adrian Grima (Malta), Janet Steele (Amerika Serikat), dan Alia Gabres (Australia).

Malam penutupan MIWF menjadi momen yang paling ditunggu. Bertemakan *Sailing with Books*, malam itu mempresentasikan proyek perpustakaan perahu bernama Perahu Pustaka. Perpustakaan perahu hasil gagasan Muhammad Ridwan dkk tersebut telah berlayar menghampiri pulau-pulau di Selat Makassar dan sejumlah kota pantai di Sulawesi Barat dan Selatan. Gagasan itu muncul sebagai bentuk kepedulian untuk menyediakan buku bacaan anak yang dirasa masih kurang. Perahu Pustaka tersebut beriringan dengan visi MIWF yang berupaya menumbuhkan minat sastra dan seruan menulis dan membaca.

Rupanya, tantangan demi menjaga eksistensi itu lebih besar terjadi di Festival Teater Modern Pelajar (FTMP) di Mataram.

Kegaduhan muncul di awal pembukaan festival yang justru datang dari rektorat Universitas Mataram, kampus yang menjadi rumah dari UKM Teater Putih. Pihak rektorat memerintahkan agar festival yang ke-17 itu dibubarkan.

Tanpa argumentasi yang jelas, pihak rektorat beralasan bahwa perhelatan FTMP bertentangan dengan kegiatan mahasiswa. Rektor Universitas Mataram sendiri bahkan menuding kegiatan tersebut mengganggu lalu lintas kendaraan proyek, lantaran kampus tersebut tengah dalam pembangunan gedung. FTMP XVII memang berlokasi di Arena Budaya Universitas Mataram. Jika tetap diadakan di sana, pihak universitas akan membebani penyelenggara untuk membayar sewa Rp15 juta per hari.

Beberapa pementasan yang ada di hari pembukaan pada tanggal 24 November 2015 kemudian selesai. Panitia langsung berkemas mengosongkan Arena Budaya Universitas Mataram untuk berpindah ke Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Membangun kembali panggung pementasan dan menyediakan terpal-terpal untuk digunakan sebagai ruang istirahat para peserta dan panitia. Panitia pun harus mengocek uang lebih pihak Taman Budaya meminta biaya sewa sebesar Rp 4 juta selama festival berlangsung.

“Semua panitia pusing enggak karuan tapi kami tetap bertekad festival harus dilaksanakan,” ujar Nurjihatul Rizkiah selaku Ketua Panitia FTMP XVII melalui wawancara. Satu persatu masalah yang menghadang festival yang memakan sembilan hari itu, yakni antara 24 November – 2 Desember 2015, dapat diatasi. Antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggara tetap melanjutkan festival ini.

pembenahan birokrasi merupakan tindakan yang jauh lebih berarti. Sebut saja dalam hal regulasi serta merangkul pihak terkait untuk menggalang koordinasi, terutama dengan Dinas Pariwisata yang merupakan eksekutor pendanaan.

Rumata' Art Space memutuskan untuk tidak mengajukan dana kepada Pemerintah kota Makassar atas MIWF 2015 yang bertemakan *Karaeng Pattingaloang: Knowledge and Universe* itu. Pengalaman sebelumnya menjadi pecut pihak penyelenggara untuk menggandeng sejumlah lembaga dan perusahaan dalam membiayai MIWF. Tak berlebihan bila penyelenggara menyatakan bahwa mereka hendak menguji kemandirian para pelaku seni di kota tersebut, termasuk mengukur inisiatif warga.

Manajer Rumata', Abdi Karya, menyatakan pihaknya memandang Walikota Makassar yang tengah menjabat itu cenderung tak sejalan dengan visi pelaku kesenian di kotanya. Selain itu, dukungan pemerintah seringkali membatasi keleluasaan panitia. Mereka cenderung mengintervensi, alias 'pesan sponsor'. Belum lagi birokrasi yang berbelit hingga urusan keuangan yang bertele-tele mulai dari pengajuan, pencairan, sampai pelaporan.

Padahal, ujar Abdi, pembenahan birokrasi merupakan tindakan yang jauh lebih berarti. Sebut saja dalam hal regulasi serta merangkul pihak terkait untuk menggalang koordinasi, terutama dengan Dinas Pariwisata yang merupakan eksekutor pendanaan.

Terbukti, banyak lembaga asing maupun nasional, komunitas, serta penerbit yang menjadi mitra MIWF. Tercatat ada 200 relawan yang ikut berkontribusi.

Liga Teater Pelajar di Lampung mempunyai kendalanya sendiri. Chepy, yang juga salah satu panitia, masih merasa belum puas kendati dirinya sudah cukup lama terlibat di acara tersebut. Ada yang dirasa masih kurang dalam setiap pemen-tasan. Usut punya usut, permasalahan sumber daya manusia menjadi kenda-lanya.

Berteater menjadi salah satu siasat dari penggagas Liga Teater Pelajar untuk mewujudkan Metro sebagai kota yang lebih dinamis. Keyakinan itu datang dari Chepy, yang juga menjabat Ketua Dewan Kesenian Metro. Chepy percaya teater mampu melahirkan pelajar yang berwawasan dan berkarakter.

Dewan Kesenian Metro mencatat, minimnya instruktur teater mengakibatkan pementasan kurang dikemas secara apik dan menarik. Padahal, menurutnya, berteater membutuhkan pelatih atau instruktur yang mumpuni di bidangnya dan setidaknya memiliki landasan teori teater yang kuat juga menguasai teknis dan *skill*. Personel seperti itulah yang masih sulit ditemui di daerah seperti Sumatera. Ada dua model instruktur yang menjadi incaran Dewan Kesenian Metro saat ini. Pertama adalah seseorang yang berlatarbelakang pendidikan teater dan aktif memproduksi selama di kampus. Kedua adalah personel yang belajar teater secara otodidak dan dibesarkan oleh pentas-pentas dan pertunjukan teater.



Pementasan karya Iwan Simatupang berjudul “RT O RW O” oleh Teater Tereng (SMK 3 Mataram).

“Tanpa menemukan dua orang itu, pementasan teater hanya akan seperti melombakan baca naskah tapi dia hafal. Karena pengelolanya tidak memahami detail menariknya sebuah pertunjukan teater,” kata Chepy.

Tak pantang menyerah, Dewan Kesenian Metro bersama komunitas teater di Lampung menyelenggarakan workshop penyutradaraan. Kali ini dikhususkan bagi mahasiswa yang ada di Lampung. Kenyataannya, hanya tersisa kurang dari lima persen mahasiswa yang bertahan dalam kegiatan tersebut. Selebihnya gagal dan tak sanggup bertahan dalam sembilan bulan latihan. Dari lima persen yang lulus pun bisa dibilang belum memenuhi standar sebagai pelatih teater.

Ketersediaan instruktur teater di Kota Metro, Lampung berbanding terbalik dengan animo pelajar yang berniat menekuni teater. Namun, Dewan Kesenian Metro mengaku mafhum dengan keterbatasan tersebut. Namun, setidaknya Dewan Kesenian bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serius menjaga semangat berteater generasi muda di sana dengan menjaga kegiatan berteater. Dengan anggaran Rp. 70 juta per tahun, Dewan Kesenian akan terus mengadakan latihan teater secara gratis bagi pelajar.



Keberlangsungan Festival Teater Modern Pelajar, Makassar International Writers Festival, dan Festival Teater Pelajar mulai menuai hasil. FTMP yang diadakan yang diadakan pertama kali pada 1999 selalu mengalami peningkatan kuantitas peserta dan penonton. Padahal event ini dulunya hanya diikuti oleh sanggar-sanggar sekolah yang terbatas hanya di wilayah kota Mataram saja. Tercatat, belum banyak acara besar di Mataram yang dapat membuat ratusan orang hadir seperti Festival Teater Modern Pelajar (FTMP).

Meski terjadi pengusiran dan membuat biaya penyelenggaraan membengkak, kerja keras panitia FTMP 2015 nyatanya berbuah manis. Ribuan tiket seharga Rp 5.000 pun terjual sepanjang festival digelar. Festival yang telah dipersiapkan panitia sembilan bulan lamanya itu terbayar. Tak kurang dari 700 penonton yang hadir, dari tua-muda hingga turis domestik dan mancanegara yang penasaran dengan perebutan “Piala Bergilir Gubernur NTB” itu. SMAK Kesuma Mataram dalam kelompok Teater Mekar adalah yang berhasil menyabet piala bergilir di FTMP XVII.¹

¹ <http://www.lombokpost.net/2015/12/05/smak-kesuma-juara-teater-modern/>

Abdi Karya dari Rumata' juga memberikan pendapatnya tentang perkembangan MIWF dari tahun ke tahun. Menurutnya, MIWF telah mampu memberi warna baru dalam kerja-kerja kreatif antar komunitas di Kota Makassar.

“Sejak pelaksanaan MIWF tahun 2011, terjadi peningkatan yang signifikan diantara komunitas kreatif di Makassar dalam hal jumlah program lintas disiplin, lintas komunitas, *gigs*, dan model kerja yang menggunakan relawan, tahap pra-acara dan maksimalisasi sosial media sebagai tulang punggung komunikasi”.

Faktanya, bila tahun lalu MIWF dihadiri lebih dari 5.000 dari beragam kalangan, festival tahun ini sukses dihadiri 7.000 pengunjung dengan jumlah penonton terbanyak di acara penutupan.

Di saat yang sama, seni teater menjadi prioritas di Kota Metro. Untuk itu Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga bersama Dewan Kesenian Kota Metro akan merumuskan ulang sistematikanya, termasuk mengembalikan sebuah pendekatan baru kepada komunitas seni di Kota Metro.

“Kita ingin pemerintahan setidaknya melalui dinas, dapat menjadi fasilitator. Kita akan kumpulkan seniman dari berbagai cabang seni, seni rupa, sastra, musik, penyair, dan lain-lain, lalu kita rumuskan beberapa program. Programnya masih seperti kemarin kita memberikan kursus kesenian tujuh cabang itu secara gratis,” kata Chepy.

Bermain seni panggung memang memiliki kesulitan sendiri. Sama halnya dengan tantangan yang dialami para pelakornya yang tak jarang menyisakan tanya. Kota Metro, Lampung jauh lebih beruntung lantaran sinergitas lembaga dan dinas setempat mampu merawat mimpinya untuk melahirkan generasi muda yang berkarakter melalui proses teater.

Seni teater misalnya sudah terintegrasi dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas. Sejumlah program kesenian dilancarkan juga dilancarkan oleh Dinas Dikbudpora seperti program “Kursus Seni” yang memberikan pelatihan dan lokakarya secara cuma-cuma dari para seniman. Kota Metro tengah berusaha mewujudkan itu semua.

Jika Korupsi, Maka #SeniLawanKorupsi Beraksi

Nur Azizah

Topik pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menjadi sampul depan media sepanjang 2015. Belum lagi usai pembahasan RUU KPK yang berpotensi menyunat kewenangan, kali ini serangan justru datang dari sesama penegak hukum. Kriminalisasi sejumlah petinggi KPK kembali terulang. Protes masyarakat riuh manakala polisi ‘menantang’ KPK dengan menangkap wakil ketuanya, Bambang Widjojanto, 23 Januari 2015.

Masyarakat pun bergerak ‘membentengi’ KPK dari ancaman pengekanan. Di kalangan seniman, protes memuncak awal Maret 2015. Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, dipilih sebagai lokasi aksi para seniman lintas generasi. Aneka karya seni tumpah di sana. Sebanyak 120 karya pegiat seni dipamerkan di Teater Kecil TIM dalam satu tajuk #SeniLawanKorupsi.

#SeniLawanKorupsi adalah rangkaian aksi tentang pemberantasan korupsi. Aksi perdana yang digelar Kamis, 5-9 Maret 2015 itu meliputi pertunjukan, pidato kebudayaan, serta pameran. Digagas oleh Koalisi Seni Indonesia dan Dewan Kesenian Jakarta, acara tersebut melibatkan 23 lembaga seni di Jakarta. Mereka yang tergabung antara lain Butet Kartaredjasa, Agus Noor, Wayang Orang Bharata, Kineforum, juga Pabrikultur. Ada pula Ruangrupa, Serrum, Card-to-Post, Creative Circle Indonesia, dan komunitas seni lain yang didukung rururadio dan Alinea TV.

“Kami menolak berada di pinggiran sebagai penonton gaduh, kami masuk ke dalam gelanggang”, ungkap Abduh Aziz sebagai salah satu penggagas. Karya Andika Nugroho, misalnya, menyindir seorang perempuan bersanggul lengkap mengenakan perhiasan dengan muka tertutup tulisan ‘Percumah mentereng kalau istri koruptor.’ Adapun karya Final Toto berupa olahan foto Presiden Soekarno pada mata uang seratus ribu rupiah yang tengah menitikkan air mata dan bertuliskan ‘Beratus Ribu Perjuangan Tersia-sia #LawanKorupsi’.



Foto: Oming Putri

Menyebar ke Daerah

“Kami sangat meyakini, ada modal sosial yang luar biasa dahsyatnya pada seluruh elemen masyarakat sipil kita untuk memberikan kontribusi aktif yang paling nyata bagi pemberantasan korupsi dan mengenyahkan kondisi Darurat Korupsi.”

Demikian sepenggal orasi berjudul “Anatomi Korupsi dan Biaya Sosial yang Mahal” yang disampaikan Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto, masih dalam acara #SeniLawanKorupsi di TIM, Jakarta.

#SeniLawanKorupsi memang punya tujuan berkelanjutan, dan aksi seniman dalam mendukung KPK semakin bergairah. Perlawanan para seniman itu pun menyeberang ke Makassar. Partisipasi kalangan pegiat seni di sana terekam pada gelaran KBJamming (Kedai Buku Jenny) Vol. 17, 23 Maret lalu. Ini kali pertama produksi seni sejumlah band di Makassar meneguhkan peran KPK. Spanduk berjudul “Kami Lawan Korupsi” dibentangkan untuk menjaring tandatangan dukungan atas gerakan #SeniLawanKorupsi.

Dalam kegiatan itu, Kedai Buku Jenny menggandeng Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), KONTRAS Sulawesi, Lembaga Penerbitan Mahasiswa FH Unhas, BEM

FH Unhas, Gerakan Radikal AntiTindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) FH Unhas, serta media Revius. Dua band besar seperti Melismatis dan Speed Instinet melengkapi menu rangkaian #SeniLawanKorupsi di Makassar. Musikalisasi puisi Sujiwo Tejo berjudul Lautan Tangis ikut menambah sedap sajian perlawanan terhadap kriminalisasi.

Dua bulan kemudian, #SeniLawanKorupsi meluas ke Cirebon, Jawa Barat. Tepat 11 Mei 2015, Soffi Institute merangkul JUSLIB atau Taman Baca juga meneguhkan karyanya dengan satu tekad lawan korupsi. Puluhan lukisan yang didominasi gambar tikus itu dipajang di Asrama Haji, Watu Belah.

Pagelaran seni dengan isu korupsi berjalan di daerah lain. Di Jogjakarta, Trio Djarot ambil bagian menggedor Panggung Hiburan Kampayo XT Square pada 12 Juni 2015. Malam itu, tajuk yang diusung adalah “Jangan Kotori Jogja dengan Korupsi”. Dalam pagelaran yang didukung KPK dan Human Right Support for Indonesia, pementasan Trio Djarot juga menggandeng Teater Segi Guruh. Dua pemain teater berbahasa Jawa, yaitu Nurul Jamilah dan Lik Slenco sukses mengocok perut penonton dengan ironi satir tentang korupsi.

Kembali ke ibukota, Teater Koma dalam pementasan terakhirnya “Inspektur Jenderal”, mengusung tema serupa. Saduran atas naskah klasik Rusia Revizor tersebut mengisahkan peperangan antar negeri Astina dan negeri Amarta tentang praktik suap dan dampak korupsi. Sementara di Kampung Kapuk, Jakarta Barat, kelompok dalam Pemuda Kapuk Independen (PemKI) menggelar kegiatan seni bertajuk “Kampung Kapuk Berantas Korupsi, Dimulai Dari Diri Sendiri.” Melalui seni lenong babodoran, masyarakat setempat diajak memahami perilaku suap dan korupsi yang biasa terjadi dalam pemilihan Kepala Desa.

Kampanye anti korupsi juga dilakukan siswa jurusan Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB) SMA 1 Purworejo. Aula sekolah pada 2 November 2015 disulap menjadi gedung pertunjukan. Pagelaran teater yang mengusung naskah karya Putu Wijaya “Jangan Menangis Indonesia” menjadi puncak. Pentas produksi besutan siswi kelas XI IBB, Kyntan Gita Palupi tersebut menandai diluncurkannya kelompok Teater SaYa (Bahasa dan Budaya) Ganesha IBB.

Terakhir, pameran bertema #SeniLawanKorupsi kembali diadakan di Gedung Gas Negara, Bandung 1-5 Desember 2015 dan seakan menjadi urutan terakhir dari kegiatan yang telah diadakan di berbagai penjuru kota. Serangkaian pagelaran seni bertema korupsi di sepanjang tahun yang diinisiasi secara organik merepresentasikan sikap tegas dan kesadaran masyarakat tentang penegakan hukum bagi koruptor, tanpa kompromi.

Bangun Bali, Bukan Reklamasi

Nur Azizah

Sebuah foto bergambar seorang relawan laki-laki Bali Tolak Reklamasi kembali memenuhi lini masa Facebook akhir November 2015. Di dalam foto tersebut terlihat ia berhasil menembus pengawalan Presiden Joko Widodo sembari menyerahkan berkas data tentang penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Foto tersebut ternyata diambil akhir Agustus. dan hingga sekarang permasalahan reklamasi tersebut belum tuntas.

Dalangnya adalah PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) yang berkeras meratakan kawasan Teluk Benoa dan mengubahnya menjadi daratan dengan alasan klise: meningkatkan pariwisata. Berbekal SK Gubernur Bali No. 2138/02-C/HK/2012, PT TWBI ngebut melobi pemerintah pusat agar proyek besarnya segera terealisasi. Melalui SK itu, Pemprov Bali memberikan hak pengelolaan kepada PT TWBI untuk memanfaatkan area seluas 838 hektar dalam jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun kemudian.

Protes masyarakat Bali pecah. Rangkaian aksi dan advokasi gegap dilakukan. Sejak 2013, masyarakat Bali telah menyerukan pentingnya kawasan Teluk Benoa dengan cara mendirikan baliho, menggelar unjuk rasa, dan berkesenian.

Rangkaian aksi penolakan terus menguat. Sekuat energi dan semangat masyarakat Bali menghendaki keutuhan Teluk Benoa. Bahkan, penangkapan seorang aktivis JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya bernama I Wayan Tirtayasa dengan jeratan pasal 336 KUHP ayat 2 tentang pengancaman nyaris tak mengendurkan niat mereka untuk menggagalkan alih fungsi Teluk Benoa.

Kawasan Teluk Benoa memiliki total luas hampir 2.000 hektar. Ia terletak di antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mengelilingi 12 kelurahan. Pulau Serangan yang telah direklamasi sebelumnya menyebabkan penyusutan luas teluk hingga 75%. Kondisi ini menjadi satu dari sekian alasan yang melatarbelakangi penolakan masyarakat Bali atas eksploitasi teluk tersebut, lagi.

Seni Hadir Berorasi

*Bangun Bali subsidi petani, kita semua makan nasi, bukannya butuh reklamasi.
Keputusan bau konspirasi, penguasa pengusaha bagi komisi, konservasi dikhianati.
Bangun Bali, tolak reklamasi. Sayang Bali tolak reklamasi.
Bangun Bali tolak dibohongi, rusak bumi dan anak negeri.*

Itulah lirik lagu Bali Tolak Reklamasi yang digagas para musisi Bali yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil bernama ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). Lagu tersebut menjadi alat advokasi bagi para musisi melawan polah penguasa dan pemerintah yang menyetujui proyek yang telah mengantongi Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 itu.

Penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa kemudian meluas hingga ke Yogyakarta. Solidaritas di kalangan pegiat seni di provinsi ini bahkan sukses mendunia. Karya seniman jalanan Digie Sigit terpilih menjadi gambar yang digunakan untuk prangko di Austria. Bentuk solidaritasnya ditunjukkan melalui gambar perempuan penari Bali yang dipajang di Desa Geneng, Bantul dan di Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta.

Di Jakarta, Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) menggagas pameran foto bertajuk “Laut Luka Blues” yang digelar 22-28 Mei 2015. Karya oleh salah satu pewarta foto Antara, Ismar Patrizki, mengisahkan tentang semangat dan perjuangan anak muda Bali menolak reklamasi Teluk Benoa.

Rentang September 2015 para seniman membawa serta permasalahan masyarakat Bali ke luar negeri. Tiga seniman yaitu Putu Oka, Oka Rusmini, dan Cok Sawitri menyampaikan penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa di hadapan masyarakat Indonesia dan Jerman yang mengunjungi Pasar Hamburg di Museum für Völkerkunde Hamburg. Ajang promosi jelang Frankfurt Book Fair 2015 pada 14-18 Oktober itu menjadi kesempatan bagi seniman asal Bali untuk menularkan semangat perjuangan mempertahankan habitat alam dari kehancuran.

Seniman lain yang juga peduli keberadaan Teluk Benoa adalah Happy Salma. Happy turut berunjuk rasa ke Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Bali untuk menyerukan keberpihakannya pada warga. Dalam aksi bersama WALHI, Happy Salma berorasi meneguhkan perjuangan masyarakat Bali untuk peduli dan mendengarkan suara rakyatnya.

Menurut penyampaian ahli sastra Bali, Sugi Lanus, Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Pernyataan ini ia ambil dari naskah sastra Bali kuno. Dalam penelitiannya, Sugi Lanus menemukan 60 titik suci di kawasan Teluk Benoa yang terdiri dari 24 Pura, 19 Loloan dan 17 Muntig.

Bersambung kembali tentang ForBali yang menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo. Ada 56 surat yang dikirimkan rakyat Bali pada September 2015 untuk menjaga ingatan Presiden Jokowi agar tak melupakan persoalan ini. Surat tersebut berasal antara lain dari Desa Adat, organisasi pemuda adat, LSM, komunitas, musisi, juga mahasiswa. Permintaan mereka sama: cabut Perpres No. 51 Tahun 2014.

Belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 mencerminkan bagaimana kepentingan investor mendahului segalanya, di samping tak menghiraukan ancaman ekologis yang dapat terjadi. Teluk Benoa akan kehilangan fungsinya sebagai waduk alami empat sungai besar yang ada.

Berkas data yang diserahkan seorang relawan kepada presiden beserta sejumlah aksi penolakan lain dalam menentang proyek anak perusahaan Artha Graha Group itu masih pasang mencari muara, mempertahankan Teluk Benoa.



Ilustrasi diolah dari gambar *Jendelaberita.com*

Melawan ASAP, *As Soon As Possible*

Nur Azizah

Setengah tahun lebih di 2015, Indonesia “sibuk” mengurus kabut asap. Bencana menahun yang tak kunjung teratasi itu telah mencederai penghuni beberapa provinsi negeri ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahkan merilis telah menghabiskan anggaran hingga Rp500 miliar untuk menangani kabut asap tahun ini.

Di Riau, puluhan pekerja seni dan mahasiswa berkumpul di teras Anjung Seni Idrus Tintin. Rencana mereka sama, menyuarakan ‘sesak napas’ mereka melalui beragam pertunjukan. Mereka antara lain budayawan Al Azhar, Furqon Elwe, Hang Kafrawi, Fedli Azis serta Monda Ganes. Pertunjukan juga diramaikan oleh sanggar dan komunitas seni Matan, Selembayung, Latah Tuah, Rumah Sunting dan Riau Beraksi.

Aksi serupa muncul tak hanya di Riau. Ribuan massa dari komunitas seni budaya, pecinta alam, Walhi, pecinta hewan langka dan organisasi mahasiswa bergabung dalam Revolusi Langit Biru. Orasi pendek di pertengahan Oktober itu diiringi band lokal yang mendendangkan kritikan terhadap pemerintah. Sindiran dan dukungan mereka sampaikan kepada pemerintah melalui musik, teaterikal dan puisi atas peristiwa yang telah menahun itu.

Simpaty para kartunis disampaikan melalui komik dan kartun dengan tagar #MasihMelawanAsap. Hal yang sama juga dilakukan oleh ilustrator dan penghobi sketsa. Mereka menggalang dukungan yang dikemas dalam rangkaian sketsa bertajuk “A.S.A.P” berserta tagar #Sketsalawanasap dan #lawan asap di media sosial. Mereka pun mengajak publik untuk peduli dan menyisihkan dana untuk membantu pembelian masker dan tabung oksigen yang akan disalurkan ke sejumlah daerah yang terkena kabut asap.

Sejumlah komunitas di Bandung menggalang dukungan penyelamatan warga di daerah kabut asap. Indonesia China Youth Exchange Program (ICYEP) 2015 misalnya menunjukkan kepeduliannya melalui gerakan yang dijuluki *Hands for Haze*. Ada pula Rumah Amal Salman ITB.



Foto dari *fajar.co.id*

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan hal yang serupa. Bertema Art to Nature “Melawan Asap”, mereka mempersembahkan konser amal Pekan Seni Jurnalistik 2015. Konser yang menghadirkan Cupumanik, Teman Sebangku, serta Parahyena itu juga menampilkan kreasi seni dari Riungan Suwanten Jurnalistik, Teater Pena, Gambang Percussin, serta Jurnalisyid.

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaporkan pada awal November 2015 menyebut 556.945 jiwa terpapar infensi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat kabut asap. Mereka tersebar di sejumlah provinsi dengan rincian 81.958 penderita di Riau yang meliputi 1.307 penderita pneumonia dan 3.764 menderita asma.

Sebaran lainnya ada di Jambi 151.839 penderita, dan sebanyak 115.484 jiwa di Sumatera Selatan. Adapun di Kalimantan tercatat sebanyak 207.373 jiwa yang kini menderita ISPA. Mereka adalah 46.672 jiwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah 62.672 dan 98.029 di Kalimantan Selatan.

Permasalahan jerebu yang menyesaki sejumlah daerah di Indonesia itu tak hanya mengorbankan jiwa warganya. Kerugian ekonomi atas kejahatan korporasi itu bahkan mencapai Rp. 200 triliun. Angka ini melampaui kerugian Negara akibat kabut asap yang terjadi pada 1997 lalu. Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebut bahwa besaran kerugian itu merupakan akumulasi dari kerugian tahun 1997 ditambah dengan kerugian dari sejumlah negara tetangga yang ikut menerima kabut asap. Itu belum termasuk kerugian dari sektor penerbangan, pencemaran air, emisi serta korban jiwa. Di bisnis penerbangan, maskapai Garuda Indonesia bahkan melansir jumlah kerugian akibat kabut asap mencapai US\$8 juta atau sekitar Rp 109 M.

Berpijak pada kerugian tersebut, lazim bila seluruh komponen masyarakat protes atas lambannya penanganan kabut asap. Bagi daerah langganan kabut asap, hal itu layaknya musim yang pasti akan terjadi. Musim polusi yang perlahan memakan asupan udara bersih, menyulitkan beraktivitas, membuat mereka harus mengurung diri di rumah.

Kabut asap membuat bencana ekologis yang tidak main-main. Hasil pengamatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui pantauan Satelit Terra Aqua selama kurun 21 Juni - 20 Oktober menunjukkan bahwa ada 2.089.911 hektar hutan dan lahan terbakar. Luasan tersebut diklaim BNPB tersebar di sejumlah titik yang 20% berada di perkebunan kelapa sawit, 20% di area penggunaan lain serta 30% sisanya berada di kawasan hutan non konsesi.

Kemunculan video bisu #MelawanAsap yang di-*posting* di Youtube mengundang perhatian dunia dan menempatkan bencana tersebut sebagai yang terburuk di Asia Tenggara. Kabut asap lantas diperbincangkan serius dalam Conference of the Parties 21 (COP21) di Paris, dengan sedang dilancarkannya kerjasama Indonesia-UNDP PBB bernama Indonesia Palm Oil Platform (InPop) sebagai perkembangan terakhir.

Bisa jadi kabut asap telah berlalu di penghujung tahun 2015 atas dimulainya musim hujan. Namun, pencegahan dan investasi ekologi sudah sepatutnya menjadi tantangan pemerintah agar 'musim kabut asap' tak lagi menjadi bencana tahunan bagi masyarakat di Sumatera dan Kalimantan.

**Ada modal sosial
yang luar biasa
dahsyatnya pada
seluruh elemen
masyarakat sipil kita
untuk memberikan
kontribusi aktif yang
paling nyata bagi
pemberantasan
korupsi dan
mengenyahkan
kondisi
Darurat Korupsi.**

Bambang Widjojanto,
dalam acara #SeniLawanKorupsi
di TIM, Jakarta.

III

**YANG HENDAK
BERSIKAP:**

**RUU Kebudayaan, Frankfurt
Book Fair, Kongres Kesenian
III, dan Dirjen Kebudayaan**

A photograph of a modern interior space, likely a museum or gallery. In the foreground, a dark wooden table displays several children's books, including 'The Kite' and 'The Little Prince'. The background features large, illuminated panels with text and images, and a person is visible in the distance.

RUU Kebudayaan: Polemik yang Tak Kunjung Usai

M. Hafez Gumay

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Koalisi Seni Indonesia bersama-sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengawal proses pembentukan RUU Kebudayaan. Dalam kurun 2013 hingga pertengahan 2014, tarik ulur RUU Kebudayaan berjalan cukup alot. Beberapa pihak menilai bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki suatu dasar hukum bagi kegiatan kebudayaan. Namun pada kenyataannya, naskah RUU Kebudayaan yang ada belum mencerminkan suatu strategi pengembangan kebudayaan yang ideal. Dalam kajiannya, Koalisi Seni Indonesia menemukan setidaknya tiga hal yang berbahaya apabila naskah RUU Kebudayaan yang ada saat ini disahkan.

Pertama, semangat yang terkandung dalam RUU Kebudayaan masih bersifat perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta ketakutan atas pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan lokal. Sementara yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah strategi pengembangan kebudayaan sebagai modal agar dapat bersaing di dunia global. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pasal-pasal yang bersifat preservasi dan bukan untuk pengembangan kebudayaan. Kedua, RUU Kebudayaan mengamanatkan pembentukan suatu badan khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebudayaan yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap masyarakat.

Dengan kata lain, badan khusus tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan sensor terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat. Ketiga, akan dilakukan sertifikasi dan standarisasi terhadap seluruh sumber daya manusia di bidang seni budaya seperti seniman, maestro, dan sebagainya. Hal tersebut diragukan akan dapat berjalan dengan baik, sebab tidak ada tolak ukur objektif untuk melakukan sertifikasi dan standarisasi di bidang seni budaya mengingat sifatnya yang subjektif, bergantung kepada pandangan setiap individu.

Oleh karenanya, Koalisi Seni Indonesia secara berkesinambungan melakukan berbagai usaha advokasi, baik kepada DPR RI, Kemendikbud, pegiat seni budaya, hingga masyarakat umum. Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pada Juni 2014, menyusun Daftar Isian Masalah RUU Kebudayaan dan

menyerahkannya kepada Kemendikbud, mengadakan diskusi publik di Taman Ismail Marzuki pada Juli 2014, serta serangkaian diskusi kecil dan sosialisasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai masalah yang terdapat di dalam RUU Kebudayaan. Di samping itu, kritik terhadap RUU Kebudayaan dari berbagai kalangan juga mengisi kolom-kolom koran nasional. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditundanya pembahasan RUU Kebudayaan oleh DPR RI periode 2009-2014.

Setelah pemilihan umum 2014 yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, terdapat banyak drama politik di tubuh DPR RI. Terjadi perebutan posisi-posisi penting di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Hal tersebut kemudian menyebabkan proses legislasi menjadi terhambat. Misalnya saja penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berjalan sangat lamban, sehingga pengesahannya mundur dari waktu yang seharusnya. Walaupun RUU Kebudayaan masuk ke dalam daftar rancangan undang-undang yang menjadi prioritas di dalam Prolegnas 2014-2019, namun hingga pertengahan 2015 tidak ada kemajuan yang signifikan dalam proses pembahasannya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada RUU Kebudayaan. Secara umum, kinerja DPR RI masa jabatan 2014-2019 dalam bidang legislasi cukup mengecewakan karena terlalu sibuk dengan berbagai masalah politik antar kubu.

Pembahasan tentang RUU Kebudayaan pun kembali meredup. Namun, dengan naskah RUU Kebudayaan yang ada sekarang serta mengingat kondisi politik di parlemen yang tidak kondusif, apapun bisa saja terjadi.

Cukup lama tidak muncul ke permukaan, akhirnya pada Agustus 2015, wacana untuk membahas RUU Kebudayaan kembali menggeliat. Hal tersebut bermula ketika Badan Legislasi DPR RI memberikan peringatan kepada seluruh komisi di DPR RI untuk menyerahkan naskah RUU yang menjadi prioritas dalam Prolegnas tahun 2015 agar dapat dibahas secepatnya. Dalam hal ini, Komisi X DPR RI memilih dua undang-undang yang mereka nilai paling siap untuk dibahas, salah satu diantaranya adalah RUU Kebudayaan. Melihat tidak ada perubahan yang substansial dari naskah RUU Kebudayaan, Koalisi Seni Indonesia mengirimkan *policy brief* kepada DPR RI yang berisi beberapa masukan perbaikan sebelum naskah RUU Kebudayaan tersebut disepakati sebagai usulan inisiatif resmi DPR RI yang akan disahkan di rapat paripurna.

Tidak berselang lama, pada bulan September beredar kabar bahwa dalam rapat harmonisasi Badan Legislatif terdapat wacana untuk memasukkan rokok kretek sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia di dalam RUU Kebudayaan.

Hal tersebut kontan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Koalisi Seni Indonesia kemudian melakukan konsolidasi dengan gerakan masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengendalian tembakau untuk menyusun strategi menghadapi masalah tersebut. Karena adanya tekanan publik yang besar, akhirnya pada bulan Oktober Komisi X DPR RI sepakat untuk menghilangkan pasal yang mengatur mengenai rokok kretek dari naskah RUU Kebudayaan. Walaupun demikian, tiga hal berbahaya dari RUU Kebudayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih tercantum di dalam naskah yang ada.

Di penghujung tahun 2015 ini, DPR RI lagi-lagi disibukkan dengan permasalahan politik yang menyebabkan proses legislasi kembali terhambat. Pembahasan tentang RUU Kebudayaan pun kembali meredup. Namun, dengan naskah RUU Kebudayaan yang ada sekarang serta mengingat kondisi politik di parlemen yang tidak kondusif, apapun bisa saja terjadi. Jangan sampai RUU Kebudayaan yang ada sekarang disahkan dan menjadi episode baru dari kegagalan Indonesia dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kemajuan bangsa.

BEKRAF: Keterbatasan di Tahun Pertama

Annayu Maharani

Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu kampanye Presiden Joko Widodo ketika Pemilu Presiden masih berlangsung. Empat bulan setelah dirinya dilantik menjadi Presiden bersama wakil Jusuf Kalla, tepatnya Januari 2015, janji Presiden diwujudkan dengan mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Triawan Munaf ditunjuk menjadi Kepala Bekraf dan dilantik pada 26 Januari 2015.

Alasan utama mewujudkan sektor ekonomi kreatif mempunyai badan tersendiri yakni Bekraf adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bekraf adalah badan Non-Kementerian dan berada langsung di bawah Presiden, dan hal ini menyebabkan Kemenparekraf turut berubah menjadi Kementerian Pariwisata. Untuk konteks Indonesia, ekonomi kreatif memang menjadi salah satu sektor potensial atas potensi budaya, pariwisata, serta peluang pasar yang ada. Karakteristik dari ekonomi kreatif adalah sumberdayanya yang tak terbatas, tetapi rantai distribusinya cenderung lebih ringkas, sehingga pertukaran lebih cepat terjadi.

Tugas utama Bekraf kemudian membuat kebijakan dan melaksanakan koordinasi terhadap aktivitas yang tumbuh ini, di mana pelaku-pelaku ekonomi kreatif telah mampu memutar roda siklus produksi-konsumsi dan menciptakan pasarnya sendiri. Setidaknya, kehadiran Bekraf diharapkan dapat marangsang pembenahan infrastruktur dan suntikan modal yang bersinggungan dengan kualitas produksi kesenian misalnya; seperti ketersediaan ruang di tahap produksi, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan perluasan pasar.

Kinerja Bekraf sepanjang 2015 masih terkonsentrasi ke dalam urusan tata birokrasi. Wajar saja, karena lembaga yang terbentuk dengan Peraturan Presiden No. 72/2015 ini harus menyesuaikan diri sebagai lembaga baru dengan segala macam bentuk regulasi yang ada. DPR menargetkan pengurusan kelengkapan organisasi Bekraf selesai sampai September 2015, dengan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Struktur BEKRAF terdiri dari enam Deputi, yaitu Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan; Deputi Akses Permodalan; Deputi Infrastruktur; Deputi Pemasa-

ran; Deputi Fasilitas HAKI dan Regulasi; serta Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Pada 27 Juli 2015, delapan jabatan petinggi Bekraf dilantik di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Tiga di antaranya adalah jabatan Wakil Kepala BEKRAF – Ricky Josep Pesik, Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan – Abdur Rohim Berawi, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah – Endah W Sulistianti.

Selain pengurusan birokrasi dalam rapat kerja beruntun bersama DPR, pembahasan program kerja beserta anggaran 2016 turut disinggung. Penyelenggaraan BEKRAF di tahun 2015 hanya ditopang dengan anggaran operasional, tanpa anggaran program. Realisasinya baru akan berjalan di tahun 2016. Dalam sejumlah publikasi, Triawan Munaf mengakui berbagai kinerja lembaganya yang masih terbatas.

Memang, potensi ekonomi kreatif Indonesia menjanjikan. Kontribusi industri kreatif terhadap PDB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kontribusinya mencapai 6,9% (2013), lalu meningkat menjadi 7,6% (2014), dan pada 2015 diperkirakan dapat mencapai 8-9%. Kini, ekonomi kreatif menempati posisi ketujuh dari 10 sektor ekonomi nasional dengan nilai Rp 573,8 Trilyun.

Masing-masing dari 16 subsektor Bekraf pada dasarnya mempunyai karakteristik dan membutuhkan perlakuan khusus yang spesifik di masing-masing sub sektor. Sub sektor seperti fesyen, kuliner, dan animasi yang nyata memberikan kontribusi ekonominya tidak bisa disamakan dengan subsektor lain yang keadaannya di Indonesia cenderung berada di ranah non komersial seperti seni pertunjukan.

Subsektor seni pertunjukan berjalan dengan gerak yang organik dan mengandalkan pelaku komunitas/jejaring yang independen. Tahapan konsumsi belum benar-benar maksimal pada sisi audiens, dengan faktor tidak berjalannya pendidikan seni dan dokumentasi yang baik, sehingga memengaruhi kualitas audiens dan tentu situasi pasar domestik. Penyelenggaraan pertunjukan dan festival yang kian marak dan menjadi kekuatan modal budaya masyarakatnya harus diperlakukan secara berbeda.

Kontribusi industri kreatif terhadap PDB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kontribusinya mencapai 6,9% (2013), lalu meningkat menjadi 7,6% (2014), dan pada 2015 diperkirakan dapat mencapai 8-9%. Kini, ekonomi kreatif menempati posisi ketujuh dari 10 sektor ekonomi nasional dengan nilai Rp 573,8 Trilyun.

Ketika Badan Pusat Statistik mencatat subsektor seni pertunjukan berkontribusi sebesar 0,4% total PDB industri kreatif dan berada di urutan bawah dibandingkan sub sektor lain, maka diperlukan indikator yang berbeda untuk menilai capaian kontribusi sub sektor ini.

Di pemberitaan terakhir, perumusan UU Ekonomi Kreatif yang membuat peraturan khusus tiap sub sektor menjadi rencana Bekraf pada 2016.

Sebelumnya, Cetak Biru ekonomi kreatif pernah dilakukan di akhir masa jabatan mantan Menteri Parekraf, Mari Eka Pangestu (2011-2014) dalam rangkaian penelitian bertajuk “Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025”, ditambah turunan rencana pengembangan 16 sub sektor. Persoalannya kemudian, apakah Bekraf dalam perencanaan programnya ke depan dapat memanfaatkan warisan dalam bentuk cetak biru yang dihasilkan pada masa Marie Pangestu, atau justru mulai lagi dari nol? Dan apakah RUU Ekonomi Kreatif yang nantinya akan dirumuskan mampu berangkat dari hasil pemetaan dan cetak biru yang sudah dihasilkan?

Kalau soal kontinuitas gagasan dan pemikiran yang dihasilkan sebelumnya saja tidak dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal, maka boleh jadi Bekraf hanya mengulangi tradisi lama yang ada di pemerintahan kita. Setiap pergantian kepemimpinan, maka sudah pasti terjadi diskontinuitas kebijakan diikuti pembuatan kebijakan baru yang fokusnya bisa saja sangat berbeda. Pada akhirnya terjadi pemborosan maupun kesimpangsiuran kebijakan yang berpengaruh langsung pada capaian yang tidak maksimal.

Letupan Imajinasi Frankfurt

Oming Putri



Frankfurt Book Fair 2015, Foto: www.ibpa-online.org

Frankfurt Book Fair (FBF) disebut sebagai pameran buku terbesar di dunia, dan pada 2015, Indonesia menjadi Tamu Kehormatan (Guest of Honour) di sana. Mengusung tema “17.000 Islands of Imagination”, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang mendapat posisi ini. Persiapan Indonesia hanya dua tahun dengan masa aktif promosi tujuh bulan, yaitu sejak Maret sampai Oktober 2015. Termin ini sangat singkat jika dibandingkan dengan Finlandia, Guest of Honour sebelumnya, dengan persiapan enam tahun.

Dampaknya, Komite Nasional Pelaksana FBF 2015 yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus kerja ekstra keras.

Goenawan Mohamad yang ditunjuk sebagai Ketua Komite mengaku anggotanya harus mengutang tidur karena perbedaan waktu antara Indonesia dengan Frankfurt. Selain itu, sistem birokrasi yang begitu hati-hati agar tak menyalahi prosedur cukup menghambat pencairan dana. Inisiatif mandiri meletup tanpa henti dari banyak pihak. Komitmen mereka satu: Indonesia harus tampil bagus.

Ada dua misi Indonesia di perhelatan megah itu. Pertama, adalah misi berdagang hak cipta buku Indonesia. Misi ini sah karena FBF – mengutip Hikmat Darmawan – adalah arena pertemuan para trader dari seluruh dunia, perjumpaan B2B (business to business) skala besar dengan hak cipta buku sebagai item yang diperjualbelikan. Misi ini penting mengingat posisi Indonesia sebagai pemborong hak cipta pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat 40.000 judul buku baru terbit pada 2014, di mana sekitar 40% – 50% diantaranya adalah buku-buku terjemahan dari Inggris, Arab, Cina, Korea, dan Jepang. Sementara sebagai perbandingan, hanya ada tujuh judul buku Indonesia yang berhasil diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman pada 2013. Inilah yang membuat Indonesia menjadi pembeli hak cipta terbesar di ASEAN.

Tak heran jika kemudian Komite Nasional berambisi untuk menerjemahkan 300 buku ke dalam bahasa Jerman dan Inggris untuk menjalankan misinya. Ambisi itu rupanya tidak tercapai penuh akibat minimnya durasi waktu penerjemahan. Butuh waktu setahun untuk menerjemahkan satu buku, sementara hanya ada sepuluh orang penerjemah cakap di dalam tim. Kondisi ini tentu tak memadai. Akhirnya, hanya ada sekitar 200 buku yang berhasil diterjemahkan dan dipresentasikan di Frankfurt.

Untuk karya-karya Indonesia lain yang tak diterjemahkan, inisiatif mandiri pun muncul dari pihak lain. Salah satunya adalah Yayasan Lontar. John McGlynn, pendiri Yayasan Lontar mengumpulkan karya-karya pendek 25 sastrawan Indonesia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan Jerman. Ia menerbitkannya dalam format buku yang agak kecil dan memberinya judul *By The Way* (BTW Books). Saat di paviliun Indonesia, buku-buku ini dideretkan di meja resepsionis, menarik perhatian pengunjung yang datang. Menurut Wikan Satriati, Manajer Publikasi Lontar, penerbit dari Bulgaria tertarik dan mengusulkan untuk menerjemahkan buku ini ke dalam tiga bahasa, yaitu Bulgaria, Inggris, dan Indonesia. Goenawan mengaku tak tahu berapa uang yang dikeluarkan McGlynn untuk itu.

Selain memanfaatkan buku-buku terjemahan, ratusan pertemuan dilakukan oleh para penerbit dan penulis Indonesia dengan pelaku yang sama di negara lain. Hasilnya, investasi jaringan terjadi dari kedua belah pihak. Salah satu penerbit yang berhasil menggunakan momen ini untuk berjejaring adalah Marjin Kiri. Ronny Agustinus, dari Marjin Kiri, mengaku bertemu dengan 15 penerbit dari beragam

negara untuk membicarakan peluang kerjasama. Selain Ronny, Nung Atasana dari Borobudur Agency pun turut memanfaatkan FBF 2015. Memanfaatkan waktu tiga hari, ia melakukan pertemuan dengan 30 penerbit asing dari Uruguay, Italia, Peru, sampai Portugal.

Misi kedua Indonesia di FBF 2015 adalah misi kebudayaan. Jika melihat kembali tema 17.000 pulau imajinasi yang diusung, misi ini boleh jadi menjadi misi paling penting dari Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Rafli L. Sato dari BAB Publishing Indonesia; meskipun Indonesia kaya akan budaya, namun Indonesia bisa disebut sebagai negara yang paling tidak terlihat. Inilah mengapa Indonesia perlu berpartisipasi sebagai Guest of Honour FBF 2015: selain untuk mengungkapkan potensi tersembunyi dari pasar buku Indonesia, juga untuk menunjukkan seni dan budaya Indonesia adalah bagian dari kebudayaan global.

Ada banyak hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjalankan misi keduanya ini. Indonesia turut membawa serta duta kuliner, mempertunjukkan tarian dan musik, serta memilih “duta budaya” yang terdiri dari kalangan penulis sebagai pembicara diskusi-diskusi di FBF 2015. Kehadiran Indonesia dalam Festival Museum Uferfest atau Festival Tepi Sungai, festival budaya terbesar di Eropa yang menampilkan berbagai pertunjukan budaya, musik, dan seni rupa dari seluruh dunia, pun patut dihitung sebagai usaha yang layak diapresiasi dari Indonesia untuk menjalankan misi kebudayaannya. Belum lagi strategi jeli dari Indonesia untuk menempatkan komik Indonesia sebagai salah satu ujung tombak lewat ruang khusus bagi pameran komik Indonesia.

Dengan demikian, layak tentunya bagi Indonesia untuk mencatat FBF 2015 sebagai pencapaian penting bagi, tidak hanya industri buku Indonesia, tetapi juga momentum kebudayaan Indonesia secara luas. Tentu dengan menyertakan apresiasi tinggi bagi inisiatif dan kerja keras dari banyak pihak karena inilah yang mampu mengubah letupan imajinasi Frankfurt menjadi nyata.



Kongres Kesenian III, Bandung, 2015, Foto: Hikmat Darmawan

Kongres Kesenian III: Meneguhkan Posisi Kesenian dan Negara

Oming Putri

Kongres Kesenian Indonesia (KKI) ketiga dilaksanakan pada 1-5 Desember 2015 silam di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung. Sebanyak lebih dari 500 pelaku seni, baik yang berprofesi sebagai seniman, akademisi, maupun dewan kesenian, dari seluruh Indonesia berhasil dikumpulkan untuk bersama-sama merumuskan rekomendasi terkait pengembangan kesenian. Rekomendasi, yang kemudian diharapkan mampu meneguhkan—kalau tak ingin disebut mereposisi—peran negara terhadap kesenian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah penanggung-jawab penyelenggara kongres dengan pelaksanaan KKI pertama pada 1995 dan KKI kedua pada 2005. Kongres ini merupakan forum pertemuan nasional yang memfasilitasi para pelaku seni dan pemangku kepentingan dengan tujuan menghasilkan strategi pengembangan kesenian.

Tema utama KKI Ketiga adalah “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan”. Tema ini ditentukan bersama oleh lima puluh orang pegiat seni yang mewakili tiap bidang—teater, musik, sastra, tari, seni rupa, dan film. Termasuk yang dibicarakan adalah penentuan subtema dan kerangka acuan. Sementara itu, dipilih tim perumus khusus yang berperan sebagai panitia pengarah (*steering committee*) untuk pelaksanaan KKI III ke depan.

Tema “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan” dilatarbelakangi dengan melihat adanya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di lingkup nasional maupun global, di mana hal ini juga mempengaruhi intensitas dinamika praktek kesenian. Tema ini lantas menyasar langsung bagaimana seharusnya peran Negara dalam merespon perubahan tersebut. Negara didesak agar dapat memposisikan dirinya lebih nyata.

Bergesernya otoritas pemerintahan dari yang sentralistik menuju desentralistik dengan membuka partisipasi publik, tentu menciptakan implikasi yang muncul dalam praktek kesenian, termasuk relasi-relasi antar agen dan kebutuhan-kebutuhan sektoral baru.

Beberapa implikasinya, sesungguhnya, sudah bisa dilihat di permukaan. Pemberlakuan otonomi menyebabkan posisi Pusat tak lagi tunggal. Di saat yang bersamaan, komunitas-komunitas seni mulai tumbuh, makin mandiri, dan menyebar di masyarakat, membawa orientasi nilai-nilai dan visi berkreasi yang juga baru. Era reformasi lantas memberi ruang untuk penyesuaian hal-hal yang mengarah kepada demokrasi, dan juga perlahan terhadap instrumen Negara—baik sistem, infrastruktur, kelembagaan, serta kebijakan.

Penyesuaian itu masih berlangsung hingga sekarang. Apa yang terjadi di dalam praktek kesenian hari ini dan kaitannya dengan negara perlu selalu dilakukan peninjauan kembali dalam untuk mengenali dan memahami dinamika keterhubungan yang terjadi. Di sinilah kemudian yang menjadi perhatian di KKI ketiga, yaitu menjadi sebuah forum pertemuan nasional untuk melakukan pembacaan dan pemetaan progresif dengan mengidentifikasi solusi yang dapat berfungsi nyata untuk mengoptimalkan peran seni itu sendiri, dalam pembangunan maupun berwarganegara.

Dalam pelaksanaannya, panitia mengarahkan empat subtema untuk membantu peserta menginventarisir berbagai permasalahan yang ada dan kemungkinan kesenian Indonesia di masa depan. Pertama adalah subtema Politik Kesenian dalam Perspektif Negara. Kedua adalah Kesenian, Negara, dan Tantangan di Tingkat Global. Ketiga adalah Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas. Terakhir, Seni dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian. Selama dua hari, subtema tersebut dibicarakan dalam Sidang Komisi yang dibagi berdasarkan fokus disiplin seni masing-masing. Dari hasil permufakatan inilah, sembilan rekomendasi KKI III—yang lalu dinamakan Deklarasi Bandung—ditujukan untuk pemerintah.

Deklarasi Bandung membuat pernyataan yang jelas tentang peran Negara. Ia memaparkan peran Negara dibatasi sebagai fasilitator untuk semakin menguatkan peran publik dalam pengembangan kesenian. Negara diminta untuk tidak menurunkan aturan dan regulasi defensif, namun lebih pada perancangan kebijakan publik untuk tata kelola pengembangan kesenian yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini dapat berbentuk Undang-Undang tentang Kesenian atau produk hukum setara Undang-Undang. Selain itu, Negara dituntut untuk menerapkan politik anggaran yang memihak, menyediakan infrastruktur (baik yang bersifat fisik maupun kelembagaan), pendidikan kesenian yang mengandung muatan lokal, pengembangan sistem pusat data yang terpadu tentang kesenian Indonesia dan penguatan juga penciptaan jejaring.

Terakhir, yang tak kalah penting, juga adalah pembentukan Sekretariat Kerja Kongres Kesenian Indonesia. Sekretariat tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pelaku seni dengan pihak pemerintah yang dapat membuat keputusan secara strategis. Termasuk di antaranya adalah sosialisasi, mengawal, dan menerapkan semua hasil keputusan kongres.

Peningkatan dalam kongres kesenian yang ketiga ini terletak pada keikutsertaan pelaku-pelaku kesenian hari ini dan transparansi berita sebelum dan selama acara melalui situs resmi Kongres Kesenian 2015. Dan tentu, apa yang paling diharapkan adalah tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi yang telah diberikan, dengan Sekretariat Kerja sebagai pendampingan, misalnya.

Karena jika tidak, kita berakhir lagi dengan nasib naskah-naskah rumusan yang terenggok tanpa realisasi, dan pengadaan kegiatan forum-forum berikutnya secara tergesa, tak meninjau apa yang sudah berhasil dipetakan sebelumnya.

Terjawab: Dirjen Kebudayaan Baru

Annayu Maharani

Pengumuman lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan di Kemendikbud akhirnya terjawab di penghujung tahun 2015. Terpilihlah Hilmar Farid, yang biasa dikenal sebagai sejarawan, aktivis, dan akademisi.

Pengumuman tersebut seakan menjadi penutup lelang jabatan Dirjen Kebudayaan yang sepanjang tahun ini mengalami proses berlarut-larut. Pasalnya, pengumuman lelang telah dilancarkan sejak 15 Mei 2015 dengan beberapa kali pengumuman ulang.

Tak lama setelah lelang jabatan diumumkan di laman resmi Kemendikbud, pengumuman lelang menuai tanggapan dari masyarakat. Salah satunya adalah tentang kepantasan kualifikasi pendidikan posisi Eselon I tersebut.

Hanya persyaratan Dirjen Kebudayaan saja yang memberlakukan kualifikasi pendidikan minimal Strata 1, tidak seperti lelang jabatan Eselon I di Kemendikbud lain yang dilakukan di waktu yang bersamaan. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah bahkan mensyaratkan kualifikasi doctor (S3). Seperti yang terlihat dari kolom Opini di Kompas oleh Pudentias MPSS yang merasa bahwa posisi Dirjen Kebudayaan seolah tidak mendapat perlakuan yang seimbang. Jika persyaratan tersebut dibuat dengan maksud mengutamakan segi profesionalitas, seharusnya lelang jabatan yang lain juga menerapkan hal yang sama.

Pada kenyataannya, posisi Eselon I ini mempunyai struktur kelembagaan yang cukup holistik dengan berbagai bidang yang memiliki kompleksitasnya sendiri sehingga menuntut suatu kinerja lintas koordinasi. Seorang Direktur Jenderal Kebudayaan akan mengepalai lima direktorat, yaitu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Pembinaan Kepercayaan Tuhan YME dan Tradisi, Sejarah dan Nilai Budaya, dan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya. Tak hanya itu, ia juga terhubung dengan lembaga independen kementerian yaitu Galeri Nasional dan Museum Nasional; serta berkoordinasi dengan kelembagaan di daerah seperti Dinas Kebudayaan.



Foto: Dokumentasi Kemendikbud

Memasuki Juni, sudah tersaring 19 nama yang mendaftar untuk beberapa lelang jabatan yang dibuka, termasuk posisi Dirjen Kebudayaan. Empat jabatan yang dilelang sudah diisi, namun tidak dengan posisi Dirjen Kebudayaan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Alasannya adalah calon-calon yang tidak memenuhi harapan. Akhirnya terpaksa, Panitia Seleksi (Pansel) membuka kembali lelang jabatan putaran kedua. Tahapan seleksinya adalah penulisan substansi dan wawancara.

Sembilan nama mencuat untuk mengisi dua posisi tersebut. Mereka terdiri dari akademisi, kurator, sosiolog, dan pejabat kementerian. Adalah Ahmad Anuf Chafidzi, Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Hilmar Farid, Dadang Sunendar, Muhammad Darwis, Yudhi Soerjoatmodjo, Zaim Uchrowi, Bambang Eryudhawan, dan Kacung Marijan. Pansel diharapkan dapat menyaring enam calon untuk kemudian diserahkan kepada Menteri Kemendikbud, Anies Baswedan. Namun lagi-lagi, selesi putaran kedua berakhir sama dengan alasan yang sama: belum memenuhi harapan.

Terpaksa, pengumuman lelang kembali diselenggarakan. Ketika itu sudah September 2015. Pada dokumen pengumuman yang dapat dilihat di laman resmi Kemendikbud, persyaratan calon juga tidak mengalami perubahan. Calon Dirjen Kebudayaan terbuka bagi kalangan PNS maupun non-PNS, kualifikasi pendidikan minimal S1, dan pengalaman minimal tujuh tahun.



Sebagai salah satu struktur di Kemendikbud, nyatanya Dirjen ini baru dapat mengoptimalkan kinerjanya dua tahun terakhir, yakni 2013. Reshuffle Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono II pada 2011 adalah penyebab sektor kebudayaan berpindah ‘payung kementerian’ dari yang bersisian dengan sektor pariwisata (Kemenbudpar) menjadi bersisian dengan pendidikan (Kemendikbud).

Di antara penyesuaian birokrasi, pelaksanaan program kerja dan prioritas yang mengacu pada Rencana Strategis kementerian dan RPJMN 2011-2015 itu lantas harus dikejar selama periode yang tersisa.

Maka, *ouput* Dirjen Kebudayaan selama kepemimpinan Kacung Marijan sebagian besar terfokus pada revitalisasi museum di pusat dan daerah dan pemberian fasilitas kesenian di sekolah seperti alat musik dan laboratorium seni. Selain pelaksanaan program, Dirjen Kebudayaan juga ikut terpaut dengan rancangan kebijakan seperti RUU Kebudayaan karena merupakan inisiatif kementeriannya sendiri (berasal dari pihak pemerintah), ditambah pada penghujung 2015 muncul Deklarasi Bandung sebagai hasil Kongres Kesenian III berisi rekomendasi dari pegiat seni yang ditujukan langsung ke Dirjen ini.

Dua perihal tersebut seakan menjadi tembusan di muka bagi Dirjen Kebudayaan baru nantinya, sebagai “mandat dari publik” untuk Negara dalam penyelenggaraan seni budaya. Tentunya, selain arah pengembangan yang telah tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan lembaga pemerintah dan urusan birokrasi.

Pelantikan Hilmar Farid yang tepat dilangsungkan pada 31 Desember 2015 menjadi jawaban dari perkembangan proses lelang yang simpang siur. Sempat terjadi semacam hilangnya kabar setelah putaran ketiga pada September berhasil menjaring lima nama, yang mana dua di antaranya adalah Slamet Widodo dan Arie Budhiman.

Harapan atas kualifikasi Dirjen Kebudayaan yang cakap justru menjadi semakin besar ketika telah terjadi partisipasi dan pengawasan publik yang juga semakin kritis terhadap sektor ini. Meski hanya berada di tataran Eselon I—pilar pertama Kemendikbud, kita tahu bahwa lembaga ini yang secara langsung membawa nama seni budaya di antara percaturan politik yang berlangsung.





Jl. Amil Raya No. 7A
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

www.koalisiseni.or.id